

**DOKUMEN VERIFIKASI
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT
(KKS) KOTA SOLOK TAHUN 2023**



PROVINSI SUMATERA BARAT

KOTA SOLOK

TAHUN 2023



I. GAMBARAN UMUM KOTA SOLOK

1. VISI DAN MISI KOTA SOLOK

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021-2024 sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”

Dari visi tersebut terlihat masa depan kondisi masyarakat Kota Solok sampai tahun 2026 adalah :

- 1) **Kota yang diberkahi** adalah kota yang masyarakatnya mengimplementasikan pengamalan syariat agama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang religius adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2021-2026. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS Al A’Raf:96 “ *Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan*”. Sehingga terbangun masyarakat yang sholeh dalam beramal, sholeh dalam berfikir dan sholeh dalam bertindak sebagai wujud pembangunan masyarakat madani. Masyarakat Madani yang dimaksudkan disini adalah masyarakat Kota Solok yang hidup aman serta patuh pada aturan atau ketentuan hukum tertentu dan menjalankan nilai agama, adat dan budaya di segala bentuk tatanan masyarakat.
- 2) **Maju** adalah Kondisi infrastruktur kota dan fasilitas publik yang lebih baik dalam menunjang percepatan pertumbuhan perdagangan dan jasa.
- 3) **Sejahtera** adalah Peningkatan standar hidup masyarakat yang makmur ditandai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
- 4) **Perdagangan dan jasa yang modern** adalah pembangunan Kota Solok yang didominasi oleh perdagangan dan jasa diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



1) Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya.

Pemerintah Kota Solok berkomitmen untuk membangun masyarakat yang berkepribadian religius dan berbudaya dapat diwujudkan melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang religius merupakan sebuah bentuk ketaatan kepada ajaran agama dan sebagai bentuk pengabdian atau kepasrahan manusia sebagai makhluk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang berbudaya tercermin melalui sikap yang harus dilakukan ketika berhubungan dengan orang lain sekaligus sebagai wadah penyalur perasaan maupun kreatifitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Dengan adanya kebudayaan dalam suatu masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang teratur sekaligus memiliki nilai dan ciri khas tersendiri. Dengan penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya akan memberikan keberkahan bagi Kota Solok. Berkah secara bahasa berarti *ats-tsubut* (tetap) dan *al-Luzuum* (terus melekat), juga dapat berarti an-namaa (berkembang) dan *az-ziyadah* (bertambah) serta *saadah* (kebahagiaan).

2) Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah Kota Solok akan meningkatkan pembangunan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Karena ekonomi kerakyatan sendiri merupakan kegiatan perekonomian atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang mereka miliki.

Potensi unggulan daerah adalah sektor ekonomi potensial yang dominan dalam mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perekonomian diartikan sebagai faktor pendorong meningkatkan daya saing daerah terutama dalam menciptakan nilai tambah produk dan jasa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dalam proses produksi tetapi juga dalam hal pemasaran dan distribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Pembangunan Kota Solok 2021-2026 yang tertuang dalam misi III ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan melalui



penguatan sistem pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat untuk bidang kesehatan. Sementara pada urusan pendidikan berorientasi untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan baik sektor formal, nonformal maupun informal. Diperkuat dengan pengoptimalan jaminan perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta pelaku pelayanan kesehatan. Hal ini dimulai dengan pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kesehatan. Yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu) yang ditunjang dengan peningkatan kualitas manajemen dan standar pelayanan kesehatan. Kondisi ini akan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum berkualitas yang memenuhi standar kesehatan dan keberadaan lingkungan yang sehat.

Sementara untuk penguatan sistem pelayanan dan jaminan kesehatan masyarakat, selama periode ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan jaminan pelayanan kesehatan warga kota (*total coverage*), menyediakan sistem informasi dan manajemen pelayanan kesehatan, pelayanan yang efektif, efisien dan berbasis IT (*smart health*).

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan baik formal, nonformal dan informal diawali dengan melakukan pemetaan mutu dan SDM (pendidik dan tenaga pendidikan), sehingga dapat dilakukan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, penguatan tatakelola yang tepat sasaran. Hal ini akan menjamin akuntabilitas dan meningkatkan citra publik penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah juga akan menjamin kelanjutan pendidikan ke jenjang menengah dan perguruan tinggi bagi siswa berprestasi, tahfiz quran dan siswa dari keluarga yang kurang mampu. Untuk itu akan diselenggarakan beasiswa pendidikan serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerataan kualitas layanan lembaga penyelenggara pendidikan dilakukan melalui pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan pada lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mencapai pendidikan yang unggul, Kota Solok akan memfasilitasi pengembangan sekolah berasrama, mengembangkan sekolah inklusi, dan memfasilitasi pengembangan mutu pendidikan menengah dan perguruan tinggi yang ada di kota Solok.

Jaminan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek akan berorientasi pada penanggulangan dan penanganan *pandemi covid 19* melalui penyediaan data dan informasi *covid 19* yang transparan dan akuntabel. Sementara penanganan dampak sosial ekonomi pandemi *Covid 19*, akan dilaksanakan dengan memberikan stimulus pemulihan



ekonomi bagi pelaku usaha, perlindungan sosial dan kesehatan bagi keluarga terparap *Covid-19*.

Disamping itu, jaminan terhadap perlindungan sosial dan kebencanaan serta pengentasan kemiskinan tetap akan dilakukan pemerintah Kota Solok dengan memberikan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini akan ditunjang dengan melakukan pemberdayaan keluarga/rumah tangga miskin untuk mampu hidup layak dan sejahtera yang melibatkan semua stakeholder yang bertanggung jawab untuk penanggulangan kemiskinan. Semua ini diperkuat dengan penyediaan data masyarakat miskin yang komprehensif dan akuntabel.

4) Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

5) Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien adalah misi Pemerintah Kota Solok yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih.

Adapun sasaran dari misi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Solok akan memfokuskan kepada peningkatan kualitas prasarana pelayanan publik, peningkatan sistem dan tata laksana pelayanan publik dan pengembangan inovasi pelayanan publik. Selanjutnya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Untuk pelayanan publik yang prima, pemerintah kota Solok akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan prinsip *good and clean government*.

Berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, pemerintah kota akan melakukan upaya peningkatan penerapan sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,



efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Untuk mewujudkan misi I, maka dirumuskan sasaran yang perlu dicapai sebagai berikut:

- 1) **Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.**
Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama dapat dilihat dari indeks kesalehan masyarakat. Kesalehan sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Indeks kesalehan sosial terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu Kepedulian sosial, Relasi antar manusia, Etika dan budi pekerti, Melestarikan lingkungan dan Patuh pada peraturan negara. Tahun 2021, Kota Solok telah melakukan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial dengan nilai 78,18.
- 2) **Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai adat dan budaya.**
Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya dapat dilihat dari Persentase pelaku adat dan budaya yang aktif ditargetkan 86 pada akhir periode RPJMD ini. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan peran Lembaga adat dan peningkatan pelestarian adat dan budaya.

Untuk mewujudkan misi II, maka dirumuskan sasaran yang perlu dicapai sebagai berikut:

- 1) **Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan Daerah.**
Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor perdagangan, sektor pariwisata dan sektor pertanian. Untuk sektor perdagangan sampai akhir periode RPJMD ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,16%. Untuk sektor pariwisata ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,5% sampai akhir periode RPJMD dan sektor pertanian diharapkan dapat tumbuh 1,64%.
- 2) **Meningkatnya Nilai Investasi.**
Peningkatan nilai investasi sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah diharapkan dapat tumbuh 6,5% setiap tahunnya sampai akhir periode RPJMD. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi faktor penentu dalam meningkatkan nilai investasi di Kota Solok.
- 3) **Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja.**
Perluasan kesempatan kerja ditandai dengan berkurangnya jumlah pengangguran di Kota Solok. Ditargetkan pada akhir periode RPJMD, tingkat pengangguran terbuka di Kota Solok sebesar 7,11%.

Untuk mewujudkan misi III, maka dirumuskan sasaran yang perlu dicapai sebagai berikut:

- 1) **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.**
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari usia harapan hidup masyarakat Kota Solok yang ditargetkan mencapai 74,98 tahun dan



prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita) sebesar 10% pada akhir periode RPJMD ini. Kondisi awal prevalensi stunting yang menjadi dasar dalam penentuan target 5 tahun ke depan adalah prevalensi stunting berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang dilaksanakan pada tahun 2019. Derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat, lingkungan yang bersih dan sehat serta faktor genetik serta intervensi penurunan stunting terintegrasi.

2) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat sangat ditentukan oleh derajat pendidikan masyarakat itu sendiri. Derajat Pendidikan masyarakat diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang ditargetkan sampai 11,48 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditargetkan sampai 14,38 tahun. Pendidikan yang berkualitas merupakan tantangan kedepan yang tidak dapat ditawar lagi untuk menghadapi persaingan yang ketat. Peningkatan derajat Pendidikan masyarakat Kota Solok dilakukan melalui pemerataan pendidikan di seluruh Kota Solok, baik itu pemerataan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan, disamping itu peningkatan akreditasi lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Solok.

3) Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat.

Peningkatan perlindungan sosial masyarakat merupakan fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk masyarakat miskin. Peningkatan perlindungan sosial kepada masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, meningkatkan produktifitas usaha ekonomi masyarakat miskin dan menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Peningkatan perlindungan sosial kepada masyarakat diukur dengan angka kemiskinan yang menurun dan persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada akhir periode RPJMD ini ditargetkan angka kemiskinan mencapai 2% dan persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 25,75% dari tahun dasar 2020, dengan jumlah PPKS sebanyak 4461 jiwa.

4) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan dan program pembangunan yang memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Kualitas perlindungan perempuan dan anak diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kota Layak Anak (KLA). Pada akhir periode RPJMD ini ditargetkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 97,86 dan Kota Layak Anak dengan predikat Utama atau nilai sebesar 865.

Untuk mewujudkan misi IV, maka dirumuskan dengan 3 sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.



Dasar hukum penyelenggaraan tata ruang di Kota Solok diatur melalui Peraturan Daerah No. 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031. Namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang. Strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang ini adalah dengan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang melalui Pengawasan pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang dan Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang diukur melalui indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW. Target yang ditetapkan pada akhir RPJMD ini adalah sebesar 73,75%.

2) **Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar**

Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar perkotaan. Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar perkotaan secara optimal. Strategi untuk meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar adalah dengan meningkatkan penanganan jalan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah.

Meningkatkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar diukur melalui indikator Indeks Kualitas Permukiman. Indeks ini diukur dari 3 komponen yaitu Persentase kondisi jalan mantap, persentase cakupan akses air bersih, persentase cakupan sanitasi layak dan persentase rumah layak huni yang tersedia. Berdasarkan data yang didapat dari komponen Indeks kualitas permukiman, maka target Indeks Kualitas Permukiman yang ditetapkan pada akhir RPJMD ini adalah sebesar 79,51%.

3) **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baiknya kualitas lingkungan diukur melalui peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL). Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas dan luasan RTH. IKLH ini terdiri atas 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sampai tahun 2026, IKLH di Kota Solok ditargetkan sebesar 71,21%.



Untuk mewujudkan misi V, maka dirumuskan sasaran yang perlu dicapai sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilihat dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan indeks profesionalitas ASN. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik ditargetkan sebesar 88,31 sampai akhir periode RPJMD dengan nilai Sangat Baik, sedangkan nilai indeks profesionalitas ASN ditargetkan sampai akhir periode RPJMD sebesar 77,17.

2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.

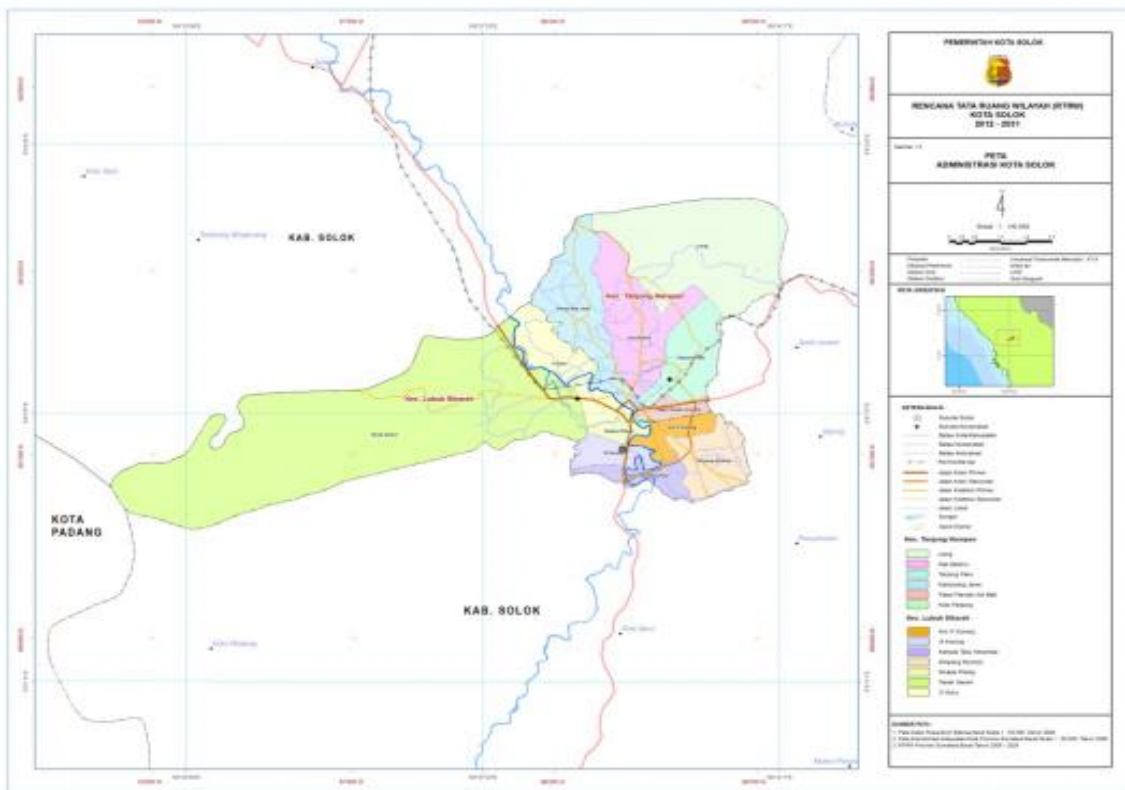
Peningkatan akuntabilitas di Kota Solok diukur dari capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Opini BPK, Tingkat kematangan implementasi SPIP dan Indeks SPBE.

Nilai AKIP menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang menilai akuntabilitas kinerja yang dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasinya. Untuk itu ditargetkan sampai akhir periode RPJMD ditargetkan nilai SAKIP Kota Solok sebesar 84. Nilai EKPPD yang merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sampai akhir periode RPJMD ditargetkan nilai EKPPD Kota Solok sebesar 4,21. Untuk Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sampai akhir periode RPJMD ditargetkan setiap tahunnya Opini BPK untuk Kota Solok adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal pengawasan, tingkat kematangan SPIP menjadi indikator untuk melihat pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Sampai tahun periode RPJMD, ditargetkan berada pada level 4. Terakhir, dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan eGov menjadi penting. Sehubungan dengan hal tersebut, indeks SPBE akan digunakan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk itu ditargetkan sampai akhir periode RPJMD, nilai indeks SPBE Kota Solok sebesar 3,4.

2. GEOGRAFI

Kota Solok secara geografis terletak pada koordinat $0^{\circ}44'28''\text{LS}$ - $0^{\circ}49'12''\text{LS}$ dan $100^{\circ}32'42''\text{BT}$ - $100^{\circ}41'12''\text{BT}$. Dengan luas kurang lebih 5.764 Ha (57.64 Km^2) atau 0.14% dari luas Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Solok



Sumber : RTRW Kota Solok 2012-2031

Batas-batas wilayah Kota Solok meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung dan Kuncir, Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Koto Baru, Koto Hilalang dan Selayo, Kabupaten Solok.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Koto Tengah, Kota Padang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Gaung, Kabupaten Solok.



Secara administratif, Kota Solok terbagi dalam 2 kecamatan dan 13 kelurahan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah di Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
A	Lubuk Sikarah	35,00	60,72
	1. Tanah garam	24,36	42,26
	2. VI Suku	3,60	6,25
	3. Sinapa Piliang	0,64	1,11
	4. IX Korong	1,50	2,60
	5. Kampai Tabu Kerambil	1,35	2,34
	6. Aro IV Korong	1,25	2,17
	7. Simpang Rumbio	2,30	3,99
B	Tanjung Harapan	22,64	39,28
	1. Koto Panjang	0,21	0,36
	2. Pasar Pandan Air Mati	0,69	1,20
	3. Tanjung Paku	2,35	4,08
	4. Nan Balimo	7,59	13,17
	5. Kampung Jawa	3,65	6,33
	6. Laing	8,15	14,14
	Kota Solok	57,64	100,00

Sumber : Kota Solok Dalam Angka, 2021

1) Topografi

Kota Solok memiliki topografi yang bervariasi dan bergelombang antara dataran dan perbukitan yaitu daerah datar dengan kelerengan 0–8% memiliki luas 2.659 ha (46,15%). Daerah-daerah yang memiliki topografi seperti ini terdapat di Kelurahan Koto Panjang, PPA, IX Korong, Aro IV Korong, Sinapa Piliang dan Sebagian kelurahan VI Suku. Daerah bergelombang dengan kelerengan 8–15% seluas 1062,13 ha (18,43%) terutama terdapat di Kelurahan KTK, Simpang Rumbio dan Kelurahan Tanjung Paku. Daerah curam dengan kelerengan 15–25% seluas 980,5 ha (17,01%) terdapat di Kelurahan Kampung Jawa, sebagian Kelurahan Nan balimo, sebagian Kelurahan Tanah Garam, sebagian Kelurahan VI Suku dan sebagian Tanjung Paku. Sedangkan daerah sangat curam dengan kelerengan 25-40% seluas 955,02 Ha (16,57%) terdapat di sebagian Kelurahan Tanah Garam (Puncak Payo), sebagian Tanjung Paku dan sebagian Kelurahan Laing. Demikian juga daerah yang terjal dengan kelerengan lebih dari 40% juga terdapat di sebagian Kelurahan Tanah Garam (Puncak Payo) dan sebagian Kelurahan Laing. Selengkapny kondisi kelerengan ini digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.2
Luas Kota Solok menurut Kelerengan

No.	Klasifikasi Lereng	Kelerengan (%)	Lubuk Sikarah		Tjg Harapan		Jumlah	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Datar	0 – 8	1452.00	41.49	1207.89	53.35	2659.89	46.15
2	Bergelombang	8 – 15	440.16	12.58	621.97	27.47	1062.13	18.43
3	Curam	15-25	730.77	20.88	249.73	11.03	980.50	17.01
4	Sangat Curam	25-40	776.79	22.19	178.23	7.87	955.02	16.57
5	Terjal	>40	100.28	2.87	6.18	0.27	106.46	1.85
Total				100		100	5764.00	100

Sumber : RTRW Kota Solok, 2012 – 2031

Berdasarkan ketinggian, wilayah Kota Solok berada pada ketinggian antara 400–1600 meter di atas permukaan laut yaitu ketinggian antara 100–500 meter di atas permukaan laut seluas 3.366 Ha (58,40%); ketinggian 500–1.000 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.380 Ha (23,94%); ketinggian 1.000– 1.500 meter di atas permukaan laut seluas 678 Ha (11,76%) dan daerah pada ketinggian di atas 1.500 meter dari permukaan laut seluas 340 Ha (5,90%).

Tabel 1.3
Luas Kota Solok Menurut Ketinggian

Nama Kecamatan	Ketinggian (mdpl)							Total
	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
Lubuk Sikarah	1.177,68	500,62	322,62	413,86	497,14	392,68	195,53	3.500,13
Tanjung Harapan	439,72	1.781,24	42,90	-	-	-	-	2.263,87
Total Luas (Ha)	1.617,40	2.281,87	365,52	413,86	497,14	392,68	195,53	5.764,00
Persentase	28,06	39,59	6,34	7,18	8,62	6,81	3,39	100,00

Sumber : RTRW Kota Solok, 2012-2031

2) Kondisi Klimatologi

Kota Solok merupakan daerah yang beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan 215 mm/tahun dan jumlah hari hujan mencapai 202 hari per tahun. Tingkat curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan Februari, dan tingkat hujan terendah terjadi pada bulan Maret. Temperatur udara rata-rata terendah mencapai 26,1°C dan temperatur udara tertinggi mencapai 28,9°C.

3) Kondisi Geologi

Bila ditinjau dari jenis tanah, sebagian besar tanah di Kota Solok didominasi oleh tanah jenis kompleks podsolik merah kuning, podsolik coklat dan latosol seluas 2.006 ha (34,80%), aluvial seluas 1.248 ha (21,65%), brown forest soil seluas 1.190 ha (20,65%), podsolik merah kuning seluas 935 ha (16,22%), dan latosol seluas 385 ha (6,68%).

4) Kondisi Hidrologi



Kota Solok dilewati oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Batang Lembang dengan panjang 9.155 m, Sungai Batang Gawan dengan panjang 3.125 m dan Sungai Batang Binguang dengan panjang 2.650 m. Sungai-sungai tersebut memiliki batas hidrologi yang mencakup wilayah Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Kondisi sungai Batang Lembang pada beberapa titik sangat rawan longsor dan sering meluap pada waktu musim penghujan yang menimbulkan genangan pada beberapa kawasan sehingga membahayakan dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap masyarakat terutama yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Kawasan yang sering dilanda banjir adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong dan Kelurahan Sinapa Piliang, dengan tinggi genangan mencapai 0,3 meter s/d 1,5 meter dan luas genangan lebih kurang 180 ha.

Di wilayah Kota Solok terdapat 1 (satu) sumber mata air, yaitu mata air Pincuran Gadang yang berjarak \pm 2 km dari pusat kota dengan kapasitas 7,3 ltr/dtk telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Solok sejak Tahun 1930.

5) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kota Solok didominasi oleh kebun campuran, hutan, sawah dan permukiman. Luas hutan Kota Solok sampai tahun 2022 mempedomani Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8089/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat yaitu 1.113 Ha.

6) Kawasan rawan bencana

Kondisi geologi Kota Solok yang dipengaruhi oleh sesar aktif Sumatera (Patahan Semangko) mengakibatkan daerah ini rentan akan bencana gempa bumi. Di samping itu, kondisi morfologi kota yang berbukit dan dilalui oleh sungai mengakibatkan Kota Solok juga rentan terhadap bencana longsor dan banjir.

a. Gempa Bumi

Kota Solok dipengaruhi oleh aktivitas lajur sumber gempa bumi sesar aktif Sumatera, dimana gempa bumi merusak sering terjadi (gempa bumi Padang Panjang tahun 1926, gempa bumi Singkarak tahun 1943, 2004 dan 2007). Selain dipengaruhi oleh lajur sumber gempa bumi tersebut, Kota Solok juga dipengaruhi oleh gempa bumi yang berasal dari jalur sumber gempa bumi Tunjaman Sumatera yang terletak pada kedalaman 100 km di bawah Kota Solok.

Wilayah dengan kerentanan sangat tinggi berdasarkan luas wilayah terdampak adalah di Kelurahan Tanah Garam dengan intensitas lebih besar dari VIII MMI berikutnya di Kelurahan Laing. Selengkapnya



Kawasan rawan bencana gempa bumi ini digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 1.4
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Solok

POTENSI BENCANA	KELAS	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (HA)
Kawasan berpotensi gempa dengan skala intensitas antara VII-VIII MMI	Kawasan rawan bencana gempa bumi menengah	Laing	Tanjung Harapan	253,37
Kawasan berpotensi gempa dengan skala intensitas lebih besar dari VIII MMI	Kawasan rawan bencana gempa bumi menengah	Aro IV Korong	Lubuk Sikarah	143,24
		IX Korong		114,72
		KTK		122,98
		Simpang Rumbio		245,29
		Sinapa Piliang		47,46
		Tanah Garam		2.585,24
		VI Suku		339,13
		Kampung Jawa	Tanjung Harapan	530,48
		Koto Panjang		10,73
		Laing		632,85
		Nan Balimo		468,70
		PPA		69,45
		Tanjung Paku		286,45

Sumber : Perda RTRW Kota Solok

b. Longsor dan Erosi Tanah

Wilayah Kota Solok yang termasuk rawan bencana longsor dan erosi tanah sebagian besar terletak di Kelurahan Tanah Garam dan Laing karena daerah ini terletak pada kelerengan lebih dari 40%. Tingkat kerawanan terhadap longsor ini juga semakin tinggi apabila daerah tersebut tidak tertutup vegetasi.

c. Banjir

Sebagian kawasan di wilayah Kota Solok merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 200 – 500 mdpl. Beberapa bagian di antaranya termasuk kawasan rawan banjir pada musim hujan. Hal ini disebabkan karena besarnya perbedaan tinggi permukaan air sungai pada musim hujan dengan musim kemarau yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan siklus hidrologi. Tinggi permukaan air pada waktu banjir mencapai 1 meter dan bahkan melebihi 2 meter.

Kawasan-kawasan tersebut adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan VI Suku dan Kelurahan Tanah Garam. Banjir yang terjadi di Sebagian wilayah Kota Solok tersebut disebabkan oleh luapan sungai Batang Lembang dan tingginya curah hujan sehingga menimbulkan genangan. Genangan ini disebabkan adanya selisih kecepatan infiltrasi air kedalam tanah dan aliran permukaan dengan air hujan yang jatuh di kawasan Kota Solok.



d. Kebakaran

Kota Solok juga mempunyai kawasan yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran. Kawasan rawan kebakaran ini terutama terletak di kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi dan permukiman padat. Dilihat dari perkembangan daerah terbangunnya, maka kawasan dengan kepadatan bangunan yang tinggi terkonsentrasi di bagian pusat kota yaitu di Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati.

Selain permukiman padat bangunan, lahan hutan juga berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Peta kebakaran hutan dan lahan dari website Inarisk BNPB menyatakan bahwa kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Laing.

3. DEMOGRAFIS

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi yang cukup penting dalam pembangunan wilayah itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Solok memiliki penduduk Tahun 2021 sebesar 76.959 jiwa, sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 79.057 jiwa yang tersebar di 13 wilayah kelurahan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel 1.5. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih dari 90 jiwa/km² yaitu Kelurahan Koto Panjang dan Pasar Pandan Air Mati.

Tabel 1.5
Kondisi Kependudukan Kota Solok Tahun 2021 dan 2022

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/Ha)	
			2021	2022	2021	2022
	Kota Solok	5764	76.959	79.057	13,35	13,72
	Lubuk Sikarah	3500	2.275	3.539	12,08	12,44
1	Tanah Garam	2436	6.272	6.883	6,68	6,93
2	VI Suku	360	7.195	7.446	19,99	20,68
3	Sinapa Piliang	64	1.594	1.602	24,91	25,03
4	IX Korong	150	1.966	2.022	13,11	13,48
5	KTK	135	2.866	2.943	21,23	21,80
6	Aro IV Korong	125	3.365	3.386	26,92	27,09
7	Simpang Rumbio	230	9.017	9.258	39,20	40,25
	Tanjung Harapan	2264	34.684	35.518	15,32	15,69
1	Koto Panjang	21	2.028	2.064	96,57	98,29



No	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/Ha)	
			2021	2022	2021	2022
2	PPA	69	6.246	6.325	90,52	91,67
3	Tanjung Paku	235	6.299	6.434	26,80	27,38
4	Nan Balimo	759	9.480	9.790	12,49	12,90
5	Kampung Jawa	365	8.763	8.943	24,01	24,50
6	Laing	815	1.868	1.962	2,29	2,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 dan 2022

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk non produktif dibandingkan dengan penduduk usia produktif, hal juga dapat menggambarkan sebaran penduduk dari kategori usia non produktif dan produktif, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2021 dan 2022

Kelompok Umur (Tahun)	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	jumlah (jiwa)	Laki-laki	Perempuan	jumlah (jiwa)
0-4	3.419	3.145	6.564	3.497	3.228	6.725
5-9	3.892	3.667	7.559	3.972	3.676	7.648
10-14	3.843	3.552	7.395	3.944	3.703	7.647
15-19	3.031	3.109	6.140	3.098	3.118	6.216
20-24	3.466	3.317	6.783	3.542	3.388	6.930
25-29	3.097	3.141	6.238	3.220	3.284	6.504
30-34	2.919	2.993	5.912	2.834	2.948	5.782
35-39	3.101	3.069	6.170	3.119	3.151	6.270
40-44	2.855	2.774	5.629	2.953	2.865	5.818
45-49	2.491	2.418	4.909	2.581	2.500	5.081
50-54	1.884	1.956	3.840	2.061	2.071	4.132
55-59	1.712	1.836	3.548	1.646	1.828	3.474
60-64	1.238	1.266	2.504	1.341	1.368	2.709
65-69	884	1.020	1.904	945	1.084	2.029
70-74	396	439	835	476	540	1.016
75-80	244	396	640	255	398	653
>80	145	244	389	153	270	423
Jumlah	38.617	38.342	76.959	39.637	39.420	79.057

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 dan 2022



Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kota Solok sebesar 48,21% artinya setiap 100 orang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif.

Tabel 1.7

**Capaian Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kota Solok
Tahun 2021-2022**

Prasyarat ODF 2023 (%)	Kelembagaan (%)		Persentase Nilai Capaian Per Tatatanan (Indikator Pokok dan Indikator Pendukung (%))								
	Lengkap	Tidak Lengkap	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
100	100		2675	2500	1100	1200	1225	1475	1275	1700	1100

Capaian Kota Solok dalam menyelenggarakan kota sehat, pada tahun 2018 – 2023 Kota Solok Sudah ODF Akses Sanitasi dan pada tahun 2019 Kota Solok mendapatkan STBM Award dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk Kelembagaan, Kota Solok membentuk Tim Pembina Kota Sehat dengan Surat Keputusan Walikota Solok sedangkan untuk Forum Kota Sehat juga ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.44-612 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kota Sehat Kota Solok Periode 2018 – 2020 dan Nomor 188.45-528 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kota Sehat Kota Solok Periode 2022 – 2025